

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Landasan negara Republik Indonesia ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, aman, bersih, makmur dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam posisinya sebagai salah satu negara yang berkembang di dunia, berusaha untuk membuat pembenahan di segala bidang dan di berbagai aspek untuk mengangkat ketinggalannya. Pembenahan dalam aspek pembangunan misalnya, hingga saat ini pembangunan di segala sektor masih belum terselesaikan dengan baik karena banyaknya persoalan-persoalan yang mempengaruhinya. Salah satu persoalan yang menjadi kendala pembenahan ini adalah maraknya tindak pidana korupsi yang selalu menjadi perhatian publik belakangan ini.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas serta keamanan bagi masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun

perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa, yaitu menjadi bangsa yang adil dan makmur<sup>1</sup>.

Tindak pidana korupsi kini semakin merajalela. Tindak pidana korupsi di Indonesia ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang semakin sistematis. Bahkan lingkupnya memasuki seluruh aspek dan kehidupan, tidak saja di lembaga *eksekutif*, *yudikatif*, tetapi juga di lembaga *legislatif*, baik di pusat maupun di daerah.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa<sup>2</sup>.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Hal itu berimplikasi terhadap diperlukannya metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang

---

<sup>1</sup> Evi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

<sup>2</sup> Drs. Ermansjah Djaja,SH.,MSi, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.183

mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan<sup>3</sup>.

Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, badan khusus yang dibentuk guna memerangi tindak pidana korupsi selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

---

<sup>3</sup> Ibid., hal.183

<sup>4</sup> Ibid.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus juga diberi kewenangan untuk memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian dan Kejaksaan, khususnya dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam pasal tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberi kewenangan lainnya yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini adalah sebagai tanggapan terhadap sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, disamping itu pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dengan pertimbangan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan

negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Namun, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan kejelasan dalam hal pembagian tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai lembaga bantu dengan lembaga-lembaga negara lainnya sehingga tidak terjadi tumbukan-tumbukan diantara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai memiliki ketumpang tindihan dengan kepolisian dan kejaksaan terkait mengenai pemeriksaan, penyadapan, menjebak, dan lain sebagainya yang menurut banyak kalangan merupakan tugas kepolisian dalam teknisnya di lapangan. Tugas, wewenang dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara jelas telah diatur. Disamping itu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berjalan secara sinergi dengan lembaga lainnya agar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat optimal. Maka yang tak kalah pentingnya adalah mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) haruslah jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat, maka diperlukan kedudukan yang sejelas-jelasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga bangsa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang jelas dan teratur.

Dengan adanya lembaga negara baru yang biasa dikenal dengan sebutan *state auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* yang diartikan sebagai lembaga negara bantu dan dalam hal ini hanya sebagai

lembaga negara yang bersifat penunjang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka akan lebih baik untuk diketahui secara jelas bagaimana kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia sebagai “*super body*” masih banyak diperdebatkan oleh banyak kalangan. Ada yang berpendapat seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu ada, karena tidak memperbaharui kinerja kepolisian dan kejaksaan, justru mempersulit kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih kabur keberadaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kedudukannya lebih rendah dari lembaga negara lainnya dan hanya merupakan suatu komisi, seharusnya tidak perlu diberi kewenangan yang begitu luas.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang masih banyak dipertanyakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sifatnya sebagai komisi negara masih memiliki permasalahan yang cukup banyak. Tidak hanya dari kalangan masyarakat awam yang dibingungkan dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalangan pembuat undang-undang dalam hal ini *legislatif* juga belum dapat memahami dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan belum dapat bekerja secara optimal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kinerjanya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Setelah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini segala bentuk korupsi baik yang ada di *eksekutif, legislatif, dan yudikatif* langsung dapat diungkap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara bantu yang berperan strategis dianggap belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dinilai belum cukup lengkap untuk menentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum didasarkan pada konsepsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih sering diperbincangkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kedudukannya serta apabila terjadi tumpang tindih dan sengketa dengan lembaga lainnya, mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bersifat sebagai lembaga negara bantu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang bukan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian masih sangatlah menarik untuk diperbincangkan mengenai kedudukan serta kewenangan lembaga negara bantu ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Penulisan ini akan membahas lebih jauh mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dari permasalahan ini penulis mencoba mengangkat tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul:

**“Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Ketatanegaraan”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan kedudukan serta kewenangannya?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.



2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat daripada dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari Penulisan Hukum/Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bermanfaat bagi ilmu hukum ketatanegaraan khususnya dalam tinjauannya mengenai kedudukan, kewenangan, kendala serta upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan di bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan saran dan masukan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu berupa saran-saran mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Bagi Penulis :

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dalam menganalisa kedudukan serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi yang ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan Indonesia.

c. Bagi Universitas :

Manfaat penelitian ini bagi civitas akademika adalah sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa lain dalam mengadakan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Bagi Pembaca :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang peran dan kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa Penulisan Hukum/Skripsi tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa diantaranya yaitu :

1. Penulisan Hukum/Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ibrahim Mukti Aji dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu studi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah yang diambil dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari sudut pandang Islam. Hasil dari Penulisan Hukum/Skripsi adalah kewenangan secara umum yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah merupakan kategori *masalah mursalah* yaitu bahwa kemaslahatan tersebut sebagai sebuah kemaslahatan yang umum. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjalankan wewenangnya dengan bantuan dan koordinasi pihak lain seperti Polisi dan Kejaksaan.

2. Penulisan Hukum/Skripsi yang ditulis oleh Rina Rahmawati dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2004 dengan judul “Urgensi Pembentukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Rumusan masalah yang diambil dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah bagaimana urgensi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil dari Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah urgensi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga pemberantas korupsi diberikan kewenangan yang sangat

kuat dan besar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistemik dan menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tonggak utama dalam pemberantasan korupsi. Bahwa dilihat dari dasar pembentukannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002 sehingga dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi. Namun demikian bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara.

Penulisan hukum/skripsi ini mempunyai perbedaan dengan kedua penulisan hukum/skripsi diatas yaitu dilihat dari segi latar belakang dan rumusan masalahnya. Persamaanya yaitu sama-sama mengkaji mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **F. Batasan Konsep**

Adapun yang menjadi batasan konsep dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah :

##### **1. Kedudukan**

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai status, keadaan, atau tingkatan orang, badan atau negara.

## 2. Kewenangan

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

## 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

## 4. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menetapkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 1 butir 1 yang menentukan bahwa tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 5. Hukum Ketatanegaraan

Hukum Tata Negara adalah serangkaian kaedah hukum yang mengatur tentang :

- a) Jabatan-jabatan dalam susunan ketatanegaraan (organ-organ negara)
- b) Cara melengkapi (pengisian) jabatan
- c) Tugas dan wewenangnya
- d) Hubungan kekuasaan satu sama lain

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*Law in the book*), serta diperlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, alasan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah karena penulis ingin berusaha mengkaji kedudukan serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam undang-undang, yang nantinya akan dikaji menurut teori-teori serta norma-norma hukum kenegaraan.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah merupakan data sekunder (bahan hukum) yang menjadi data utamanya, dimana data sekunder (bahan hukum) dalam penulisan normatif terdiri dari :

### a) Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang Penelitian Hukum ini adalah :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang menunjang penelitian hukum ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet, dan juga kajian hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

c) Bahan Hukum Tersier

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mendengar, memahami dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang diambil guna dimintakan pendapat hukumnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini karena jenis penelitiannya adalah jenis penelitian hukum normatif, maka yang



digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami serangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang komperhensif mengenai permasalahan yang akan diteliti. Mengenai proses penalaran yang digunakan adalah proses penalaran deduktif. Proses penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yaitu berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan Hukum/Skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan, dimana dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian hukum ini, yang masing-masing terkait mengenai kedudukan serta kewenangan Komisi Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan ditinjau dari perspektif hukum kenegaraan.

Bab II berisi Pembahasan, dimana bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan didasarkan pada pengertian, kedudukan, fungsi/kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan ditinjau dari perspektif hukum kenegaraan.

Bab III berisi Penutup, dimana dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran yang relevan untuk Penulisan Hukum/Skripsi ini.

